

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Sekretaris Daerah dengan Bupati Gresik tahun 2024. Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana table berikut :

NO	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	91% < 100%	sangat tinggi
2	76% < 90%	tinggi
3	66% < 75%	sedang
4	51% < 65%	rendah
5	< 50%	sangat rendah

Capaian TUJUAN Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 sebagai berikut :

TUJUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan TI IK : INDEKS SPBE	4.28	4.32	100.92%
menguatkan inovasi daerah berlandaskan pembangunan kolaboratif disemua level pemerintahan IK : INDEKS INOVASI DAERAH	45.92	54.43	118.53%

Berdasarkan 2 (dua) indikator tujuan Sekretariat Daerah terdapat 1 (satu) indikator dengan capaian kinerja di kategori “Sangat tinggi”. Sedangkan satu indikator kinerja dengan capaian kinerja di kategori “Sedang”

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.25	3.07	94.53%	SANGAT TINGGI
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100%	67.62%	67.62%	SEDANG
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90%	98.70%	109.67%	SANGAT TINGGI
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75	95.6	127.47%	SANGAT TINGGI

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	100%	SANGAT TINGGI
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75%	88.59%	118.12%	SANGAT TINGGI
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75%	91.30%	121.73%	SANGAT TINGGI
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	83	80.60	97.11%	SANGAT TINGGI
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	SANGAT TINGGI
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik	Sangat Baik	100%	SANGAT TINGGI
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA				103.62	SANGAT TINGGI

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) indikator sasaran, 9 (sembilan) indikator memiliki capaian kinerja >91% kategori "SANGAT TINGGI" dan 1 (satu) indikator persentase kebijakan kesra yang memiliki capaian kinerja 68% kategori "SEDANG" hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan mekanisme pemberian bantuan beasiswa sehingga tidak dapat tidak dicairkan pada tahun 2024.

B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA (2023)

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	REALISASI 2023	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.07	3.07	Nilai Belum rilis
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	136.59	67.62%	Menurun
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	91.92%	98.70%	Meningkat
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	94.3	95.6	Meningkat
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	Tetap
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	83%	88.59%	Meningkat
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	93.48%	91.30%	Menurun
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	81.93	80.60	Menurun
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Sangat Baik	Sangat Baik	Meningkat

Sebagaimana pada tabel diatas, pengukuran capaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat diketahui bahwa dari 10 (sepuluh) indikator sasaran, terdapat 5 (lima) indikator yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 , terdapat 3 (tiga) indikator mengalami penurunan , terdapat 1 (satu) indikator Nilai LPPD yang belum rilis dari kementrian dalam negri dan 1 (satu) indikator tetap

C. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.35	3.07	-
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	100	67.62%	-
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	90	98.70%	+
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	75	95.6	+
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	Level 4	level 3	-
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	75	88.59%	+
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	75	91.30	+

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	TARGET 2026	REALISASI 2024	KETERANGAN
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	84	80.60	-
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	Baik	Sangat Baik	+
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	Baik	Sangat Baik	+

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 terdapat 6 (enam) indikator dengan tingkat kemajuan POSITIF atau melebihi dari target akhir tahun 2026 rencana strategis dan 4 (empat) indikator dengan tingkat kemajuan NEGATIF atau belum melampaui dari target akhir tahun Renstra 2026.

D. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DIBANDINGKAN DENGAN RATA-RATA CAPAIAN NASIONAL / PROV. JATIM / KAB. KOTA LAIN

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PROV JATIM / KAB. KOTA LAIN	KAB. GRESIK	LEBIH RENDAH/ LEBIH TINGGI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3.69	3.07	lebih rendah dibandingkan Prov Jatim
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi		67.62%	-
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan		98.70%	-
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	91.77	95.6	lebih tinggi dibandingkan rata kab/kota

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PROV JATIM / KAB. KOTA LAIN	KAB. GRESIK	LEBIH RENDAH/ LEBIH TINGGI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	level 3	level 3	sama dengan Kab/Kota
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD		88.59%	-
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah		91.30%	-
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	84.19	80.60	lebih rendah dibandingkan Prov Jatim
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	baik	Sangat Baik	lebih tinggi dibandingkan kab
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	baik	Sangat Baik	lebih tinggi dibandingkan kab

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 10 indikator terdapat 1 (satu) indikator yang realisasinya sama dengan realisasi kab/kota lain dan terdapat 2 (dua) indikator yang realisasinya lebih rendah dari provinsi jawa timur/nasional. 3 (tiga) indikator yang realisasinya lebih tinggi dari rata-rata kabupaten / kota di provinsi Jawa timur. dan sisanya belum tersedia data pembanding

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	data rilis hanya sampai tahun 2022	dilaksanakan komitmen kepala Perangkat Daerah dalam pemenuhan IKK
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	Dilakukan Perubahan Perbup terkait mekanisme pemberian bantuan Beasiswa	Pemberian Bantuan Beasiswa diberikan By Name By Address dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati ddan didasarkan pada DTKS
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	penyederhanaan prosedur pengajuan produk hukum	meningkatkan target kinerja
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	terdapat bantuan UMKM dan layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak dan penyandang disabilitas.	dilakukan koordinasi secara intens dengan OPD terkait
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	komitmen bersama seluruh OPD dan update pelaksanaan sesuai ketentuan dari LKPP	koordinasi dan monev secara berkala
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	komitmen kepala daerah dan perbaikan tata kelola BUMD	fasilitasi dan monev kinerja secara berkala
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	dilakukan monev secara berkala oleh tim TEPA	penggunaan sistem Informasi untuk meningkatkan pengawasan terhadap capaian kinerja OPD

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	ANALISIS KEBERHASILAN / KEGAGALAN	SOLUSI
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	Perencanaan Kinerja belum memenuhi standar yang berkualitas	Mereviu kembali dokumen perencanaan kinerja
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	penggunaan media sosial untuk mempublikasikan kegiatan pimpinan	pemanfaatan teknologi informasi untuk mencounter berita hoax
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	penyederhanaan persyaratan pelayanan umum	reviu SOP secara berkala

D. EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	PAGU ANGGARAN	REALISASI	capaian
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	1.374.999.268	668.449.640	48.61
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	38.104.494.806	28.664.446.000	75.17
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	941,335,000.00	859.222.589	91.28
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	558,665,000.00	490.611.800	87.82

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	999.999.867	723.782.722	72.38
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	1.000.000.000	484.139.416	48.41
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	1.249.729.371	623.235.230	49.87
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	1.000.000.000	633.716.720	63.37
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	4.000.000.000	3.427.891.358	85.70
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	60.174.845.593	54.304.441.387,08	90.24
JUMLAH		109.404.068.905	90.859.936.862.08	83.05

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat Pagu anggaran untuk sekretariat daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 adalah sebesar Rp.109.404.068.905 dan terealisasi sebesar Rp90.859.936.862.08 atau 83.05% capaian tersebut termasuk kategori "TINGGI"

Sasaran Renstra	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA	CAPAIAN ANGGARAN	EFISIENSI
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan kesejahteraan rakyat secara agile dan inklusif serta kebijakan bidang hukum yang harmonis	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	94.53%	48.61%	
	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi	67.63%	75.17%	
	Persentase Produk Hukum yang ditetapkan	109.67%	91.28%	
	Indeks Capaian Kabupaten Peduli HAM	127.47%	87.82%	
Terwujudnya penyusunan kebijakan daerah di bidang pembangunan, perekonomian dan sumber daya alam secara agile dan berdaya saing serta pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel	Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai dari LKPP)	100%	72.38%	
	Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD	118.12%	48.41%	
	Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah	121.73%	49.87%	
Terwujudnya pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi secara agile (akas) serta pelayanan protokol, komunikasi pimpinan, dan umum yang responsif	Predikat AKIP	97.11%	63.37%	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokolan	100%	85.70%	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Umum	100%	90.24%	
Rata-rata		103.62	83.05%	6.96
Kategori		SANGAT TINGGI	TINGGI	

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 batas efisiensi adalah -20% sampai dengan 20%. . Berikut rumus perhitungan efisiensi :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

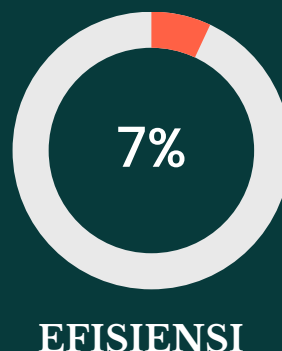
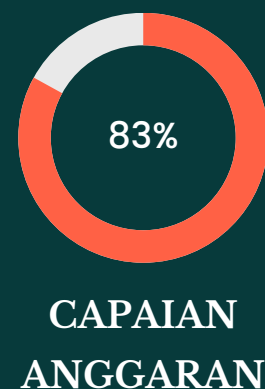
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Dengan mengacu pada rumus tersebut maka diperoleh efisiensi sebagai berikut :

$$E = \frac{6.798.965.837.50}{97.658.902.699.58} \times 100\% \\ = 6.96$$

Capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik menunjukkan hasil rata-rata capaian kinerja sebesar 103.62% dengan kategori "SANGAT TINGGI" dan rata-rata capaian anggaran sebesar 83.05% dengan kategori "TINGGI" dan efisiensi sebesar 6.69%



SASARAN I :

TERWUJUDNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SECARA AGILE DAN INKLUSIF SERTA KEBIJAKAN BIDANG HUKUM YANG HARMONIS

INDIKATOR SASARAN 1.1 :

NILAI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dilihat bahwa nilai LPPD tahun 2022 adalah 3,0721 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 3.25 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 94.53% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.374.999.268 terealisasi sebesar Rp668.449.640 atau 48.61%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Penataan Administrasi Pemerintahan
2. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
3. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah



PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN LPPD



DESK PENYUSUNAN LPPD
PERANGKAT DAERAH

INDIKATOR SASARAN 1.2 :

PERSENTASE KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG DIFASILITASI

Berdasarkan hasil rekapitulasi kebijakan kesejahteraan rakyat dapat dilihat bahwa Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang difasilitasi tahun 2024 adalah 67.62 dengan kategori “sedang”. Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp38.104.494.806 terealisasi sebesar Rp28.146.700.000 atau 73.87%

KEBIJAKAN	USULAN	REALISASI
HIBAH LEMBAGA	65	55
HIBAH TEMPAT IBADAH	389	321
BEASISWA	102	0
TOTAL	556	376



Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
- Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN 1.3 : PERSENTASE PRODUK HUKUM YANG DITETAPKAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi produk hukum yang ditetapkan dapat dilihat bahwa Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tahun 2024 adalah 98.70 jika dibandingkan dengan target 90% maka capaian kinerja sebesar 109.67% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp941,335,000.00 terealisasi sebesar Rp859.222.589 atau 91.28%.

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 2 sub kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

KEBIJAKAN	USULAN	REALISASI
PERDA	10	10
PERBUP	75	71
SK, , SE, MoU	1435	1435
total	1.520	1516



Rapat Koordinasi Lanjutan
membahas Program
Pembentukan Perda 2025

INDIKATOR SASARAN 1.4 :

INDEKS CAPAIAN KABUPATEN PEDULI HAM

Berdasarkan hasil penilaian kementrian HAM dapat dilihat bahwa Nilai Rata-rata Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Kabupaten Gresik tahun 2024 adalah 95.6 jika dibandingkan dengan target 75% maka capaian kinerja sebesar 127.47% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp558.665.000 terealisasi sebesar Rp490.611.800 atau 87.82%. Pencapaian tersebut ditunjang dengan sub kegiatan : Fasilitasi Bantuan Hukum

Nilai Ham ditunjang oleh beberapa aksi antara lain :

- Memberikan bantuan usaha dan membangun hubungan kemitraan bisnis bagi perempuan kepala keluarga di bidang usaha mikro kecil dan menengah.
- Optimalisasi Layanan bantuan hukum bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat yang berhadapan dengan hukum
- Menyediakan layanan pendidikan inklusif yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
- Menyediakan layanan kesehatan jiwa yang memenuhi standar pelayanan minimum di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama



Focus Group Discussion
Pengembangan Pesantren
Ramah Anak

SASARAN II :

TERWUJUDNYA PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG PEMBANGUNAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SECARA AGILE DAN BERDAYA SAING SERTA PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABLE

INDIKATOR SASARAN 2.1 :

KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA



Layanan Konsultasi Penyedia
di Loker PBJ MPP

Berdasarkan hasil penilaian dari LKPP dapat dilihat bahwa Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa adalah level 3 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp999.999.867 terealisasi sebesar Rp723.782.722 atau 72.38%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

INDIKATOR SASARAN 2.2 :

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA BUMD



Rapat Tindak lanjut
permodalan Perumda Giri Tirta



Rencana Bisnis Bank (RBB)
Tahun 2025 Perumda BPR
Bank Gresik

Berdasarkan perhitungan realisasi pendapatan BUMD dibandingkan dengan target pendapatan BUMD dapat diketahui bahwa Rata - Rata Capaian Kinerja BUMD tahun 2024 adalah 88.59 jika dibandingkan dengan target 2024 75% maka capaian kinerja bagian perekonomian dan SDA adalah 118,12% dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp484.139.416 atau 48.41%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian dan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

NO	BUMD	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	GIRI TIRTA	260.669.428.000	217.183.944.710	83.32%
2	GRESIK MIGAS	61.779.388.896	62.165.299.649	100.63%
3	BPR BANK GRESIK	14.105.042.487	11.540.338.414	81.82%
RATA-RATA		61.779.388.896	62.165.299.649	88.58%

INDIKATOR SASARAN 2.3 :

PERSENTASE CAPAIAN KINERJA APBD PERANGKAT DAERAH



RAPAT KOORDINASI DAN
EVALUASI APBD TAHUN 2024
TRIWULAN III



DESK CAPAIAN KINERJA OPD

Berdasarkan perhitungan realisasi APBD dibandingkan dengan Pagu anggaran Tahun 2024 dapat diketahui bahwa Persentase Capaian kinerja APBD Perangkat Daerah diatas 80% adalah sebesar 91.30 atau sebanyak 42 OPD jika dibandingkan dengan target 75% maka capaian kinerja sebesar 121,73 dengan kategori "SANGAT TINGGI".

Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.249.729.371 terealisasi sebesar Rp623.235.230 atau 49.87%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

- Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan,
- Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	APBD	3,9 T	3,6T	93.03%

SASARAN III :

TERWUJUDNYA PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAERAH DI BIDANG ORGANISASI SECARA AGILE (AKAS) SERTA PELAYANAN PROTOKOL, KOMUNIKASI PIMPINAN, DAN UMUM YANG RESPONSIF

INDIKATOR SASARAN 3.1 :

PREDIKAT AKIP

Berdasarkan Hasil penilaian sapip tahun 2024 adalah 80.60 jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 83 maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 97.11% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.000.000.000 terealisasi sebesar Rp. 633.716.720 atau 63.37%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
2. Fasilitasi pelayanan publik dan tata laksana
3. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	26,43	25,24
2. Pengukuran Kinerja	30	23,93	23,72
3. Pelaporan Kinerja	15	12,96	13,03
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,61	18,61
Nilai Hasil Evaluasi	100	81,93	80,60
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A



DESK PENYUSUNAN POHON KINERJA

INDIKATOR SASARAN 3.2 : INDEKS KEPUASAN PELAYANAN KEPROTOKOLAN

Berdasarkan Hasil survey kepuasan layanan keprotokolan menggunakan aplikasi sukma e-jatim maka nilai SKM tahun 2024 adalah 91.56 92.39 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar kategori "sangat baik" maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp4.000.000.000 terealisasi sebesar Rp.3.427.891.358 atau 85.70%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan
2. Terlaksananya Fasilitasi komunikasi pimpinan
3. Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan



LAYANANA KEPROTOKOLAN DAN DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN

INDIKATOR SASARAN 3.3 :

INDEKS KEPUASAN PELAYANAN UMUM

Berdasarkan Hasil survey kepuasan layanan keprotokolan menggunakan aplikasi sukma e-jatim maka nilai SKM tahun 2024 adalah 92.39 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan target tahun 2024 kategori "sangat baik" maka capaian kinerja sekretariat daerah sebesar 100% dengan kategori "SANGAT TINGGI". Hal tersebut ditunjang dengan pagu anggaran sebesar Rp.60.174.845.593,00 terealisasi sebesar Rp.54.304.441.387,08 atau 90.24%

Pencapaian tersebut ditunjang dengan 3 sub kegiatan antara lain :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah



LAYANANA UMUM